

**TATACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
MENURUT PERMA NO. 5 TAHUN 2019**

(Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H) Pada Strata Satu
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Uin Sumatera Utara

Oleh:

MAIMUNAH SIAGIAN

NIM. 02.01.16.21.30



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1442 H

**TATACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
MENURUT PERMA NO.5 TAHUN 2019**

(Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk)

Oleh:

MAIMUNAH SIAGIAN

NIM: 02.01.16.21.30

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA
NIP. 198407062009121006

PEMBIMBING II



Dr. Ali Akbar, S.Ag, MA
NIP. 197104122007101003

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Nurul Huda Prasetya M.Ag

NIP.196709182000031002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perma No.5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Maret 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Syakhsiyyah.

Medan, Maret 2021
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan
Sekretaris,

Ketua,

Ibnu Radwan Siddik T, M.Ag
NIP. 197409102000031001

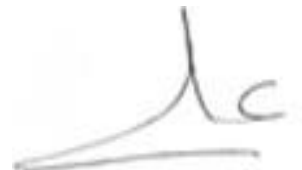


1.Dr. Muhammad Syukri Albani Nst,
NIP. 198407062009121006

3.Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 1968020119932005

Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831292008011005

Anggota-Anggota



2.Dr.Ali Akbar, MA
NIP. 197104122007101003

4.Dr. Elvira Dewi Ginting, M.Hum
NIP. 198107292009012012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, MA
NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perma No. 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.p/2020/PA.Lpk). Perma Nomor 5 ini di undangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2019, tak hanya berlaku pada Pengadilan Agama saja, namun juga berlaku pada Pengadilan Negeri, Seperti yang dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (10) bahwa “pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari’ah, pada Ayat 11 menerangkan bahwa “Hakim adalah hakim tunggal pada tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah. Pada ayat 5 di jelaskan pengertian Dispensasi Kawin yatu “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin). Apakah Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut sudah konsisten di terapkan dalam menetapkan putusan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B? Keputusan hakim belum konsisten dalam menetapkan putusan permohonan Dispensasi Kawin. Dalam memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan berupa peninjauan ke lokasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Juga wawancara sebagai bentuk komunikasi langsung dengan ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B dan juga melakukan studi pustaka, studi ini dilakukan dengan cara melihat dan mencari literature yang sudah ada untuk memperoleh data yang berhubungan dengan analisis pada penulisan tugas akhir. Mengumpulkan dan menelaah buku-buku atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan pembahasan ini. Berdasarkan dari data-data yang diperoleh, penulis menyimpulkan hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B belum konsisten dalam menerapkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 pada penetapan permohonan Dispensasi Kawin. Ada beberapa Pasal dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak di terapkan, namun putusan tetap mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh berkembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga penulis rangkai dalam kata atas rahmat dan karunia Allah Swt. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar SH. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjuang menyelamatkan kita dari zaman kegelapan dan kebodohan menuju zaman terang benderang serta dengan ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan skripsi yang sederhana dengan judul “TATACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO.5 TAHUN 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk)” penulis banyak mendapati hambatan, namun dengan hadirnya bantuan dan doa dari berbagai pihak maka pada akhirnya skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr Syahrin Harahap, MA selaku rektor UIN Sumatera Utara
2. Bapak Dr.H.Ardiansyah, Lc, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Nurul Huda Prasetya M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal AlSyakhsyah dan bapak Heri Firmansyah, Ma, selaku Sekretaris Jurusan AlAhwal Al-Syakhsyah
4. Bapak Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA dan bapak Ali Akbar, S.Ag, MA selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak membimbing saya

dengan penuh sabar dan dengan kerendahan hati mereka telah meluangkan waktu demi terselesaikannya skripsi saya dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

5. Bapak Drs. Hasbullah Ja'far MA selaku pembimbing akademik saya yang sudah membimbing mulai dari semester 1 hingga saat ini
6. Bapak Drs. Muslim, SH.,MA selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I B yang telah banyak membantu saya selama melakukan riset dengan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini juga memberikan semangat yang tinggi pada saya.
7. Segenap dosen UIN Sumatera Utara khususnya di fakultas Syariah dan Hukum yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran dalam memberikan ilmunya
8. Ayah tercinta Usman Siagian dan Ummi tercinta Zainab Manurung, hadir sebagai sosok orang tua yang sempurna dalam hidup saya, mengorbankan segenap hidup mereka demi impian dan kebahagiaan terlebih dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Saudara saudari sekandung saya, kedua kakak saya Almarhumah Nur Asiah Siagian dan Hapsah Siagian, kedua abang saya Yusuf Siagian dan Ibrahim Siagian juga adik saya Ismail Siagian, yang telah dan terus menjadi penyemangat dan penyelamat dalam setiap keadaan saya terlebih untuk menggapai cita-cita untuk mendapatkan gelar SH
10. Bunda tersayang Dra. Hj. Tjek Tanti Lc, MA yang telah banyak membantu saya secara materil dan mendidik saya dengan lembut dan budi luhur sejak awal perkuliahan sampai dapat menyelesaikan skripsi ini

11. Sahabat-sahabat seperjuangan (AS-D 2016), terutama Zeni Larasati dan Dwi Hariati yang selalu ada menemani dan membantu penulis selama kuliah hingga akhir skripsi.
12. Sahabat Mira Rostiana dan kakak terkasih Hariawati,SE yang telah memberikan dukungan selama saya menulis skripsi ini
13. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Aamiin.

Semoga Allah merahmati dan memberi kemudahan dalam hidup mereka atas balasan segala kebaikan yang mereka berikan kepada saya. Saya berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca terkhusus bagi saya sendiri. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Maret 2021

Maimunah Siagian

0201162130

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar	iv
Kata pengantar	v
Daftar Isi.....	x

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah.....	17
C. Tujuan penelitian.....	18
D. Kerangka pemikiran	18
E. Metode penelitian.....	21
F. Sistematika penelitian.....	22

BAB II: TINJAUAN TENTANG DISPENSASI KAWIN

A. Pengertian dispensasi kawin dalam kontruksi islam	24
B. Batasan usia pekawinan menurut Fiqih Syafi'i	27
C. Pengertian dispensasi kawin menurut perundang-undangan di Indonesia	33
D. Batasan usia pekawinan menurut perundang-undangan di Indonesia.....	36

BAB III: RANGKUMAN MENGENAI PERMA

A. Kedudukan Perma	42
B. Latar belakang Perma No 5 Tahun 2019	50

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN

A. Kekuasaan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara	64
---	----

B. Pertimbangan majelis hakim di PA Lubuk Pakam dalam menetapkan putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk	62
C. Apakah putusan no. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk tersebut sudah sesuai dengan Perma No.5 Tahun 2019?	70

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83
----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
-------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PA, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.¹ Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai segi yang berkaitan dengan putusan.

Pembahasan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan

¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1997), h.122

dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 (dulu dalam pasal 18 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman).

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini putusan yang di jatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- b. Hukum kebiasaan,
- c. Yurisprudensi, atau
- d. Doktrin hukum.²

Hal ini di tegaskan dalam Pasal 23 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR,

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Kalola Printing, 2017), h. 889

hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan Pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.

Putusan MA No. 2461 K/ Pdt/1984. *Judex facti* dianggap salah menetapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, Karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.

Peradilan agama adalah lembaga agama yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara itu terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh hakim yang merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan.³

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili

³ Mohammad Daud Ali dan Halibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 113

setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RGB dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal) meskipun dilaksanakan dengan iktikad baik.⁴

4. Diucapkan di muka umum

a. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperative

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial* pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*. Dalam literatur disebut *the open justice principle*. Tujuan utamanya,

⁴ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h.893

untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehavior*) dari pejabat peradilan.

b. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan:

- 1) Tidak sah, atau
- 2) Tidak mempunyai kekuatan hukum⁵

c. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai perkara perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Kemudian hal itu digariskan dalam Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan pasal itu yang menegaskan pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup

d. Diucapkan dalam sidang pengadilan

Dimana ditegakkan prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum? Dilakukan dalam ruang sidang gedung pengadilan yang ditentukan untuk

⁵ Ibid, h.895

itu. Inilah patokan umum yakni di ruang sidang gedung pengadilan. Hal ini jauh hari sudah ditegaskan dalam SEMA No. 04 Tahun 1974. Selain persidangan terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hokum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

- e. Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang

Banyak yang berpendapat, proses pemeriksaan yang terbuka untuk disiarkan dan ditayangkan melalui media radio dan televisi langsung dari ruang sidang, berperan melindungi saksi serta membuat hakim yang memeriksa perkara tidak berlaku sewenang-wenang.⁶

Berdasarkan asas putusan dan formulasi putusan bahwa dalam memutuskan perkara harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup dalam pertimbangan hokum dan ketentuan perundang-undangan, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hokum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.

Berbeda dengan Putusan No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk, dalam penerapan Perma No. 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Lubuk Pakam belum sepenuhnya mengikut pada Perma No. 5 Tahun 2019, majelis hakim masih sumir tidak persis mengikuti dari Perma tersebut, yakni pemeriksaan hakim belum memenuhi tatacara menurut Perma tersebut.

⁶ Ibid, h.898

Dalam hal ini penulis juga akan menuliskan beberapa point yang menjadi pokok penelitian penulis. Dalam Perma No 5 Tahun 2019 terdapat beberapa pasal yang belum di terapkan secara penuh oleh hakim dalam memutuskan permohonan Dispensasi Kawin, seperti hakim belum hakim tunggal, dan masih menggunakan atribut lengkap yang selanjutnya akan penulis jabarkan dalam Bab berikutnya.

Penulis juga sudah mewawancarai hakim dalam Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan juga hakim diluar Pengadilan Lubuk Pakam. Salah seorang hakim yang bernama Drs. Muslim,SH.,MA dengan pangkat/gol: Pembina utama muda (IV/c) dan jabatan sebagai ketua pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, beliau mengatakan “Memang ada beberapa pasal dalam Perma Nomor 5 tahun 2019 belum 100% diterapkan dalam putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk.”

Beliau juga memberikan satu putusan lainnya kepada penulis dimana putusan tersebut juga belum sepenuhnya mengikuti tatacara pemeriksaan menurut Perma No. 05 Tahun 2019, beliau mengatakan bahwa rata-rata penetapan dispensasi nikah yang diputus oleh Majelis Hakim masih sumir tidak persis mengikuti petunjuk dari Perma tersebut.

Penulis juga bertanya pada hakim diluar Peradilan Agama Lubuk Pakam yaitu seorang hakim yang bertugas di Peradilan Agama Rantau Perapat dan juga sebagai Dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSU, beliau bernama bapak Bakti Ritonga, beliau mengatakan bahwa Kasus dan putusan diluar wewenang Peradilan beliau, maka beliau tidak bisa kasih koment, namun beliau juga mendukung untuk menganalisis agar

mengetahui dimana kesalahannya, beliau mengatakan jika untuk penelitian maka hal itu dipebolehkan.

Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi yan berjudul **“TATACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NO.5 TAHUN 2019(Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk).”**

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang dan fakta diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian Dispensasi Kawin menurut Fiqh dan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa pertimbangan Majelis Hakim di PA Lubuk Pakam dalam menetapkan Putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk?
3. Apakah Putusan No. 0017/Pdt.p/2020/PA.Lpk tersebut sudah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap tujuan dalam penelitian adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengertian dispensasi kawin menurut Fiqh dan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Penelitina ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan perihal apa pertimbangan majelis hakim di PA Lubuk Pakam dalam menetapkan Putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk
3. Untuk mengetahui apakah Putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk

D. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dini (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum pernikahan ditetapkan, beberapa Negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih mungkinnya pernikahan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain, aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).⁷

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang

⁷ Asep Saepudin Jahar,Dkk, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*,(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),h. 43

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya akan penulis rinci dalam batasan usia perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia pada bab berikutnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

Dalam Pasal (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.⁸

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 6401 (2019).

sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.

Untuk mengantisipasi disparitas penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, karena peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas dan rinci tentang proses mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Dispensasi Kawin). Perma tersebut menetapkan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi kawin berdasarkan asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan

10. Kepastian hukum.

Apakah Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut sudah konsisten di terapkan dalam menetapkan putusan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B?

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, penulis akan menguraikan lebih lanjut mengenai dispensasi kawin pada bab-bab selanjutnya, yang akan menjadi tinjauan penulis dalam menganalisis Putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk ialah upaya untuk mengetahui tatacara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin menurut Perma No. 5 Tahun 2019.

E. Metodologi penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni dengan meneliti langsung ke lapangan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tertanggal 03 Agustus 2020 sehubungan dengan judul penelitian ini.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer yakni diperoleh dari hasil wawancara
- b. Sumber data skunder untuk memperkuat data yang di peroleh dari data primer yaitu dari buku-buku, jurnal, maupun dari ebook.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi, penulis hanya mengamati tidak serta dalam berpartisipasi.

b. Wawancara

Wawancara dengan ketua pengadilan.

c. Metode dokumentasi

Dalam bentuk putusan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Pengolahan data

Penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi penulis menggambarkan dan meringkas data yang diperoleh sehingga menemukan kesimpulan bertujuan untuk penghalusan data dan selanjutnya memperbahi kata dan kalimat.

F. Sistematika Penelitian

Dalam meneliti perkara mengenai masalah Dispensasi Kawin, penulis membagi kepada beberapa bab dan sub bab, terdiri dari lima bab yang mana antara satu bab dengan bab lain saling berkaitan, sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan tentang dispensasi kawin, mencakup: pengertian dispensasi kawin dalam konstruksi Islam, batasan usia perkawinan menurut imam Syafi'i,

pengertian dispensasi kawin menurut perundang-undangan di Indonesia, batasan usia perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia.

Bab III rangkuman mengenai Perma, yaitu: kedudukan Perma, latar belakang belakang Perma No. 5 Tahun 2019, Isi Perma No 5 Tahun 2019.

Bab IV mengenai analisis putusan yaitu mencakup kekuasaan kehakiman dalam memutuskan suatu perkara, pertimbangan majlis hakim di PA Lubuk Pakam dalam menetapkan putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA/Lpk, apakah putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA/Lpk tersebut sudah sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019?, isi putusan.

Bab V merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini atau penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG DISPENSASI KAWIN

A. Pengertian dispensasi kawin dalam kontruksi Islam

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Namun orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mencapai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa, orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atas penghalangan dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.⁹

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰

Menurut fuqaha dari kalangan Syafi'iyah, perkawinan ialah akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami istri (*wathi'*) dengan lafadz “nikah” dan “*tazwij*” atau terjemahannya.¹¹

بَابُ النِّكَاحِ وَهُوَ لُغَةً، الضَّمُّ وَالْإِجْتِمَاعُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَنَّاكَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذْ تَمَائِلَتْ وَأَنْضَمَّ
بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pedata Islam di Indonesia cetakan ketiga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7.

¹⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum pedata-cet 31*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 23

¹¹ Ibrahim al Bajury, *Hasyiyatu al Bajury 'ala ibni Qasim al Ghazy*, (Beirut: Daru Ihya'i Turats al 'Araby: 1996), h. 100.

وَشَرَّعًا, عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ: وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الْوُطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ.

Bab nikah: menurut bahasa, nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagai mana dikatakan orang Arab “pepohonan itu saling bernikahan” jika satu sama lainnya becondongan dan bekumpul.

Menurut Syara’ adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadh إِنْكَاحٍ (menikahkan) atau تَزْوِيجٍ (mengawinkan), kata “Nikah” itu sendiri secara hakiki berma’na aqad, dan secara majaziy bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.¹²

Syarat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syari’at adalah apabila yang bersangkutan telah baligh. Oleh Karena itu, seorang pria yang belum baligh tidak dapat melaksanakan *qabul* secara sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah calon mempelai pria harus menyatakan *qabul* (menerima nikah) secara sadar dan bertanggung jawab.

Perilaku yang bertanggung jawab merupakan salah satu indikasi kedewasaan. Dalam hal ini bertanggung jawab mengandung dua hal penting. *Pertama*, orang yang bertanggung jawab harus dapat bereaksi dan bertindak secara tepat dalam setiap situasi. *Kedua*, berani menghadapi kenyataan, mau menerima resiko dari perbuatannya, tidak membohongi orang lain, apalagi diri sendiri.

Perlunya rasa tanggung jawab inilah, maka dalam perkawinan Islam memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Problem utama yang mendorong ulama

¹² Aliy As’ad, *Fathul Mu’in Jilid III*, (Yogyakarta: Menara Kudus,1979), h. 1.

untuk merumuskan berbagai teori dan metode ijtihad adalah kenyataan abadi yang dihadapi oleh Islam bahwa *Nash* Al-Qur'an dan hadis terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang untuk itu, berbagai teori dan metode ijtihad pun dirumuskan oleh ulama untuk mengembangkan nilai-nilai *nas* yang terbatas ke dalam realitas yang tak terbatas.¹³

Sebagai doktrin, *maqasid al-syari'ah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu dicamkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu; *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder), *tahsiniyyat* (pelengkap), dan masing-masing peringkat tersebut mempunyai unsur-unsur penyempurna (*muhkamilat*).¹⁴

Menyikapi permasalahan perkawinan semacam ini maka kemaslahatan sangat diutamakan. Asy-Syatibi dalam menegaskan kemaslahatan ada lima pokok yang harus dipegang antara lain; memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*). Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Namun kemaslahatan itu dapat terwujud apabila lima unsur pokok di atas itu harus dipegangi.

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasarkan azas-azas yang islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan hanya terbatas

¹³ Elly Surya Indah, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No.1 Tahun 1974*,:Skripsi,(November 2008),h.3-5

¹⁴ Agus Moh Najib, *Maqasid Al-Syari'ah*,(IAIN Sunan Kalijaga: BEMJ PHM,2003),h.31

dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.¹⁵ Untuk itu sebelum dilaksanakan perkawinan perlu adanya persiapan yang matang dari kedua calon mempelai. Perkawinan di usia muda di mana kondisi psikologis maupun sosialnya belum matang sering kali menimbulkan sosial yang kurang baik, kebiasaan dilakukannya perkawinan di usia muda harus ada pertimbangan khusus. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, apabila dilakukannya mengakibatkan suatu kemudharatan maka perkawinan harus dicegah.¹⁶ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال.

Jika terjadi perkawinan itu akan mendatangkan kerusakan maka menghindari kerusakan harus diutamakan. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.¹⁷

Dalam konstruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah.¹⁸

B. Batasan Usia Perkawinan Menurut fiqh Syafi'i

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan disebut dengan *fiqih*

¹⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, cet 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), h.24

¹⁶ Indah, *Minimal Usia Perkawinan*, h.13.

¹⁷ As-Suyuti, *Al-Asybah Wa An-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h.83.

¹⁸ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.145.

munakahat. Mengamalkan hukum yang diatur dalam *fiqih munakahat* merupakan bentuk ibadah karena diambil sumber hukum Islam Al-qur'an dan hadits. Melanggar hukum ini berarti melanggar pedoman yang ditetapkan Allah SWT.¹⁹

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan social bagi manusia baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.²⁰

Secara bahasa masalah dapat diartikan sebagai menarik manfaat dan menolak adanya kemudharatan, sedangkan arti mursalah adalah terlepas dari penunjukan syariat baik dianggap ataupun menolak.²¹ Sedangkan menurut terminology ushul fikih, masalah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syari'at akan tetapi tidak ada dalil tertentu dari syari'ah yang membenarkan dan membatalkan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.²²

Bila dilihat lebih teliti pernyataan al-Siba'i yang mengutip al-Qulyubi dapat diartikan bahwa Islam tidak pernah menetapkan adanya batasan minimal usia bagi perempuan atau laki-laki untuk menikah, namun pelaksanaan pernikahan tersebut sangat terkait dengan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri.²³

Nabi juga pernah menikahkan anak perempuan pamannya (Hamzah), dengan seorang laki-laki dan Abu Salamah, keduanya ketika itu umurnya masih berusia muda belia. Diantara sahabat Nabi ada yang mengkawinkan anak putra-putrinya atau

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), h.5

²⁰ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1962), h.220.

²¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Beirut: Mu'asasah Al-Risalah, 1998), h.237

²² Wahbah Zuhailiy, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Dimsyah: Dar Al-Fikr, 1998), h.757

²³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.203

keponakannya masih berusia muda belia, ‘Ali bin Abi Thalib mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kultsum dengan ‘Umar bin Khattab, saat itu Ummi Kultsum masih muda, ‘Urwah bin Zubair juga mengawinkan anak perempuan saudaranya dengan laki-laki saudaranya yang lain, kedua keponakannya itu sama-sama masih berusia muda belia.²⁴

Seperti dijelaskan al-Marzawi dalam *Ikhtilaf al-Ulama*, Ulama, terutama kalangan *Ahl al-‘ilm*, sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki atau perempuan) adalah boleh, bahwasanya Rasulullah Saw. Menikahi Aisyah ketika ia berumur enam tahun, dan hidup bersama pada umur 9 tahun. Hal inipun dibolehkan oleh para sahabat, seperti ‘Umar ibn Khatthab, ‘Ali ibn Abi Thalib, Ibn ‘Umar, Zubayr, Ibn Qudamah, Ibn Maz’un, dan ‘Ammarah.²⁵

Para *Fuqaha* berbeda pendapat mengenai syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Misalnya, As-Syafi’I berpendapat bahwa salah satu dari syarat sahnya nikah adalah adanya wali, tanpa kehadiran wali pernikahan tersebut adalah batal. Sedangkan Abu Hanifah, wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri akad perkawinannya, baik gadis atau janda.²⁶

Demi menjaga kemaslahatan umat yaitu untuk memelihara keturunan dan kemaslahatan dalam membina keluarga, perlu adanya sesuatu aturan yang mengatur tentang kapan seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Adanya sikap

²⁴ Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Jogjakarta: LKSIS,2007),h.91.

²⁵ Imam Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Nashr al-Marwazi, *Ikhtilaf al-Ulama*, (Beirut: ‘Alim al-Kutub,1985),h.125

²⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*,(Kairo: Dar Al-Fat,1990),h.241

kedewasaan dalam fisik, biologis, sosial, ekonomi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Untuk itu, orang yang dewasa dalam rumah tangga akan mampu mengendalikan emosi yang sewaktu-waktu dapat mengguncangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Bagaimanapun perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih mentah baik fisik ataupun mentalnya. Perkawinan menuntut kedewasaan dan tanggung jawab oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Pembatasan umur memang besar gunanya diantaranya adalah supaya kedua calon suami istri yang sudah dewasa tersebut dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu rumah tangga.

Ditinjau dari kesehatan jiwa, setiap anak yang menjelang aqil baligh tidaklah berarti anak itu telah dewasa dan siap untuk kawin. Apalagi ditinjau dari segi psikologi anak tersebut kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami istri apalagi sebagai ayah dan ibu.

Hukum Islam menentukan tingkat kedewasaan dengan indikasi adanya kematangan jiwa yang diisyaratkan dengan *ihtilam* (mimpi bersenggama) bagi anak laki-laki atau keluar darah haid bagi wanita. Apabila tanda-tanda tersebut belum keluar sampai batas usia tertentu, maka para ulama menentukan kedewasaan dengan batas usia.²⁷

²⁷ Indah, *Minimal Usia Perkawinan*, h.15-16.

Adapun di dalam hukum Islam, ada istilah kecakapan yaitu kapan seseorang itu dikatakan cakap bertindak dimuka hukum, dalam hal ini mengenai batas minimal usia kawin seseorang. Kecakapan itu sendiri diartikan dengan istilah *ahliyyah*. *Ahliyyah* itu sendiri ada dua macam, yaitu *ahliyah al-wujub* yang berarti kecakapan seseorang untuk menanggung hak dan kewajiban. Kecakapan ini didasarkan pada *insaniyyah* atau didasarkan sebagai manusia (sifat kemanusiannya) yang ada semenjak ditiupkan ruh ke dalam tubuh pada saat ia masih hidup dalam kandungan ibunya. Kemudian yang kedua adalah *ahliyyah al-ada'* atau kecakapan bertindak yang berarti kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut syara' baik dalam bidang *muamalah*, *ibadah*, *jinayah* dan sebagainya. Dasar dari kecakapan ini adalah kemampuan akal.²⁸

Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara'.

Pemahaman istilah baligh relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama madzhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:²⁹

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

²⁸ Chaerul Umam,dkk, *Ushul al-Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2000),h.339.

²⁹ Nur Fadhilah dan Khariyati Rahmah,"*Rekonstruksi Batas Usia Pekawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*," *Istilah: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 4(Juli 2012),h.52.

Bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akal terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum.

2. Abu Hanifah

Berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

3. Imam Malik

Menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan.³⁰

Selain dari keempat madzhab tersebut, penulis juga mengutip pendapat dari madzhab Ja'fari. Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Madzhab Ja'fari juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur.³¹

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, juz 1, (Kairo: Dar al-Uribah, 1964), h. 602-603.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB Cet IV, (Jakarta: Lentera, 1999), h. 317

C. Pengertian Dispensasi Kawin Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya. Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami istri, perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan agama.³²

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi yang hampir sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2 KHI berikut:

Sama halnya dengan definisi perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, KHI menyebut perkawinan sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat dan disebut juga dengan *mitsaaqan ghalidzan* antara suami dan istri. Di sana juga disebutkan bahwa perkawinan sebagai bentuk ketaatan menjalankan perintah Allah SWT dan bernilai ibadah.

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undang tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

³² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet.1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h.11

³³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.³⁴

Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzammil mengemukakan bahwa dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan.³⁵

Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (5) menyatakan Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam KHI pada pasal 15 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Izin kawin merupakan permohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai yang belum berusia 21 tahun dan tidak mendapat izin dari

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.102

³⁵ Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang" *Istilah: Jurnal Pembaharuan Hukum* 1,2 (Mei-Agustus 2014), h.211.

orang tuanya kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Permohonan izin dapat diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita, dapat dilakukan kumulatif kepada pengadilan agama atau mahkamah syari'ah. Selanjutnya pengadilan agama atau mahkamah syari'ah dapat memberikan izin melangsungkan perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.

Pengadilan agama atau mahkamah syari'ah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau wali. Permohonan kawin bersifat voluntair yang produk hukumnya berupa penetapan. Dan kasasi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemohon yang tidak puas dengan penetapan tersebut.³⁶

Kepastian hukum dengan adanya dispensasi nikah maka hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan yang sah, seorang akan memperoleh bukti dari pernikahan yang sah berupa akta nikah, akta nikah selain sebagai bukti otentik terhadap akibat hukum yang timbul dari pernikahan yang sah, akta nikah juga memiliki jaminan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan yang sah.³⁷

Berdasarkan akta nikah sebagai bukti otentik terhadap keabsahan seseorang telah melakukan pernikahan yang sah, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di

³⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h.122

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), h.116.

buat oleh pegawai pencatatan nikah.”³⁸ Ketentuan yang sama terdapat dalam pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan “bahwa tiap-tiap pernikahan dicatatan menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku”.

D. Batasan Usia Pekawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia

Usia pekawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pekawinan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu befikir dan besikap dewasa. Selain itu, batasan usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertambahan penduduk.³⁹

Penetapan batas usia perkawinan sebenarnya tidak cukup dikaitkan pada fisiologis semata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis (kejiwaan) dan sosial. Khususnya sosial ekonomi karena kematangan sosial ekonomi sebagai salah satu factor yang sangat berperan sebagai penyangga kehidupan berumah tangga. Kematangan sosial ekonomi pada umumnya juga berkaitan dengan umur individu, makin bertambah umur seseorang kemungkinan untuk kematangan sosial ekonomis akan semakin nyata dan pasti. Sebaliknya, dalam usia yang masih muda telah melangsungkan perkawinan, maka dapat diperkirakan kemungkinan kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial

³⁸ Pasal 7, Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Peundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar maju, 2007), h.48

ekonomi dan lainnya akan segera muncul yang dapat membawa akibat yang cukup rumit dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁰

Beberapa Negara belakangan ini, melihat bahwa penetapan usia nikah harus dilakukan, tidak terkecuali di Indonesia. Negara-negara tersebut merasa bahwa usia nikah harus dibatasi karena pernikahan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat mempelai belum dianggap matang. Untuk itu Negara mulai melakukan intervensi terhadap pengaturan pernikahan, dan isu ini kembali muncul. Ketika aturan muncul, isu pernikahan dini mencuat saat beberapa praktik pernikahan dini yang tidak sesuai dengan aturan dikemukakan.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Mengenai halnya dengan

⁴⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet 1, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984), h.25

permohonan dispensasi nikah Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hokum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.⁴¹

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke pengadilan agama berdasarkan daerah hokum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 12 dan pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di pengadilan agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan, menyatakan sebagai tersebut:

Pasal 12

- a. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 da 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 13

⁴¹ Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo,1999),h.183.

- a. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari pengadilan agama.
- b. Permohonan dispensasi nikah bag mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
- c. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
- d. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Kemudian setelah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka usia perkawinan di ubah.

Memutuskan:

Menetapkan: undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴²

Pasal 1

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebaga berikut:⁴³

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

⁴³ Ibid,h.186

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁴

⁴⁴ Ibid,h.186

BAB III

RANGKUMAN MENGENAI PERMA

A. KEDUDUKAN PERMA

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Mahkamah Agung yang (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.⁴⁵

Jika melihat sejarahnya, Mahkamah Agung adalah sebagai kelanjutan dari *Het Hooggerechts Hof Vor Indonesia* (Mahkamah Agung Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia), yang didirikan berdasarkan RO tahun 1842, diubah, *Het Hoogerechtshof* (HGH) yang merupakan hakim kasasi terhadap putusan-putusan *Raad van justitie* (RVJ) merupakan pengadilan sehari-hari bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka. Setelah Indonesia merdeka keberadaan *Het Hoogerechtshof* ini tetap dipertahankan dan diberlakukan sebagai lembaga Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945. Kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 pada pasal 1 ayat (2)

⁴⁵ Septiana Anipatus Shalihah, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)," (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), H.3.

mengukuhkan Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara bersama-sama dengan lembaga tinggi lainnya.⁴⁶

Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman mempunyai fungsi mengatur sehingga menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Kewenangan Mahkamah Agung membuat Perma ini, semata-mata harus dan hanya bersifat pelengkap, dalam arti Perma tersebut merupakan penyempurnaan atau pelengkap terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, tidak dibenarkan Mahkamah Agung untuk menerbitkan Perma yang memuat tentang kebijakan umum yang tidak memiliki sandaran dan kaitannya dengan peundang-undangan yang telah dikeluarkan DPR dan Presiden.⁴⁷

Pasal 79

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Apabila kita melihat kepada pasal 79 UU 14/1985 jo. UU 5/2004 jo. UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, maka disebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila

⁴⁶ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 262-263

⁴⁷ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 14

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”, dimana penjelasannya berbunyi:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan peraturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini”.⁴⁸

Ada dua hal yang menarik dicermati dari ketentuan Pasal 79 dan penjelasannya tersebut. *Pertama*, terkait dalam batasan materi Perma. Batasan ini dapat dilihat dari tujuan pembentukan UU MA dalam memberi kewenangan membentuk Perma. Materi Perma adalah misteri yang belum diatur dalam Undang-undang. Norma ini menunjukkan pentingnya kedudukan Perma. *Kedua*, ruang lingkup pengaturan Perma sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Pembentukan UU MA juga sudah memberikan rambu-rambu agar materi Perma tidak mengambil materi yang seharusnya menjadi materi Undang-undang. *Ketiga*, penjelasan Pasal 79 pada paragraf kedua antara lain menyebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MA dibedakan dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang. MA juga tidak dapat mencampuri dan melampaui pengaturan hak dan kewajiban warga negara.⁴⁹

Hierarki yang dimaksud dalam undang-undang no. 12 tahun 2011 ini adalah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas

⁴⁸ Ronald S. Lumbun, *Perma RI: Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.3.

⁴⁹ Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)” Istilah: Jurnal Rechts Vinding, (Februari 2017), h.1-2

bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang telah menggantikan undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam bab III pasal 7 tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan terdiri atas:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud ayat (1)

Dari pasal tersebut diperoleh pemahaman bahwa peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk kedalam susunan peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Namun dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

⁵⁰ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h.211

diakui kebenarannya sebagaimana termaktub dalam pasal 8 undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jenis peraturan perundang-undang selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan peundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas, Peraturan Mahkamah Agung kedudukannya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 berada di luar hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di perintahkan

⁵¹ Ibid,h.211

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Mahkamah Agung dalam sistem hukum hampir setiap negara merupakan pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dalam sistem peradilan di Indonesia posisi Mahkamah Agung menempati piramida teratas, oleh karenanya lembaga peradilan tertinggi tersebut diharapkan dapat melakukan koreksi terhadap setiap putusan-putusan yang keliru pada pengadilan tingkat bawahnya dan sekaligus menjamin tegaknya rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam era reformasi sekarang ini, Mahkamah Agung juga dituntut untuk melakukan reformasi di seluruh bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama reformasi pada tubuh Mahkamah Agung itu sendiri agar ia dapat memainkan peran dan fungsinya yang ideal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵²

Tugas dan fungsi yang diberikan kepada Mahkamah Agung berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku saat ini, maka Mahkamah Agung mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi, peninjauan kembali dan sengketa perampasan kapal asing. Pasal 28 UU Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki

⁵² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, h.158.

kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi dan peninjauan kembali serta kewenangan mengadili terhadap semua lingkungan peradilan. Selain itu Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan mengadili sengketa mengenai kapal asing.⁵³

2. Fungsi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yakni pengaturan pengujian materiil oleh Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) yang menegaskan, “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang”. Pengujian hak uji materiil ke Mahkamah Agung diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2004, yang menurut PERMA tersebut pengujian hak uji materiil ke Mahkamah Agung hanya dapat dilakukan melalui permohonan kasasi.
3. Fungsi Pengaturan, yaitu fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung lahir berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 14 tahun 1985. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam perundang-undangan. Penjelasan Pasal 79 menyatakan bahwa peraturan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Agung ini berbeda dengan peraturan yang dibentuk oleh pembentuk UU karena sifat peraturan yang dapat dibuat oleh Mahkamah Agung hanya

⁵³ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), h.147.

pengisi kekosongan hukum acara dan tidak dapat mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara atau yang berhubungan dengan pembuktian. Wujud dari fungsi mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung biasanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) misalnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

4. Fungsi pengawasan dan pembinaan. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung diatur dalam UU Nomor 4 tahun 2004 dan UU Nomor 14 tahun 1985. Berdasarkan UU tersebut obyek dan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pengawasan terhadap penasehat hukum, notaris, serta pengawasan terhadap hakim dan proses peradilan. Mahkamah Agung juga tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam menerima dan memutus perkara.⁵⁴
5. Fungsi pertimbangan dan nasehat hukum. Kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 14 tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi lainnya. Sedangkan kewenangan untuk memberikan nasehat hukum diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 14 tahun 1985 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan nasehat kepada Presiden dalam menerima dan menolak grasi.

⁵⁴ Ibid, h.148

6. Fungsi administratif, Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badanbadan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari keinginan penyatuan atap lembaga peradilan.⁵⁵

B. LATAR BELAKANG PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019

Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini di undangkan pada tanggal 21 November 2019, dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut disebutkan Menimbang atau yang melatarbelakangi di undangkannya Perma ini ialah:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang;
- b. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan ole lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Bahwa perkawinan di izinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundnag-undangan;

⁵⁵ Ibid,h.143

- d. Bahwa proses mengadili dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN

A. KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA

Asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal 24 ayat (1), berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Dan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.⁵⁶

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bentuk amanah tertinggi dalam Negara, yang secara filosofinya merupakan kedaulatan Tuhan yang dilaksanakan oleh hakim sebagai komponen utama pelaksana kekuasaan kehakiman.⁵⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi

⁵⁶ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.50

⁵⁷ Ibid, 48

Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.⁵⁸

Penilaian hukum sebagai proses pemaknaan akal budi dan hati nurani manusia terhadap teks undang-undang terhadap peristiwa konkret yang dijalankan hakim, melibatkan perspektif pemikiran dan hati nurani yang bersifat individual. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual. Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna tersembunyi di balik teks undang-undang. Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin kompetensi dan integritas hakim agar tetap dipercaya masyarakat; pertama, sejauh mana hakim bisa bekerja dengan objektif, apakah hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas (kebebasan hakim) tidak bias atau berat sebelah, dan apakah senantiasa berpihak pada kebenaran. Kedua, apakah benar hakim yang baik, secara sadar atau tidak sadar tidak akan dipengaruhi sikap *prejudice*, disebabkan latar belakang sosial politiknya ketika memutuskan perkara, padahal seharusnya bersikap objektif dan imparsial. Ketiga, apakah sikap bias dipengaruhi cara hakim dalam

⁵⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. 209-210

memahami kedudukan dan fungsinya, karena setiap mengadili perkara akan terjadi pro dan kontra.⁵⁹

Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu, Wahyu Affandi menegaskan, karenanya hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern. Sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Akan tetapi Sudikno Mertokusumo, tetap memberikan batasan-batasan dalam hal menjalankan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, ia menyatakan, walaupun merdeka kekuasaan kehakiman tersebut. Hakim dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidaklah mutlak sifatnya. Secara mikro, hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan perilaku atau kepentingan para pihak, sedangkan secara makro hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun pada bagian lain Sudikno Mertokusumo menguraikan, disadari bahwa kebebasan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas daripada negara hukum.

Lebih lanjut, menurut Sudikno Mertokusumo diperlakukannya pengawasan atas kekuasaan kehakiman. Bentuk pengawasan untuk membatasi kebebasannya, maka

⁵⁹ Jimly Assidhiqie, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2009), h.188

putusannya harus dikoreksi. Oleh karena itu, asas peradilan yang baik (principle of good judicature) ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.

Dengan demikian dapat ditarik benang merahnya, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah mutlak adanya. Akan tetapi tetap dibatasi oleh rambu-rambu hukum yang ada. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent judiciary) telah menjadi ideologi yang universal masa kini dan masa datang.⁶⁰

Konsep indenpendensi peradilan yang dijalankan hakim, pada umumnya selalu dikaitkan dengan konsep akuntabilitas, sebagai sarana keterbukaan menerima kritik dan kontrol dari luar serta kesadaran yang bertanggung jawab.⁶¹

Sistem kekuasaan kehakiman sebagai salah satu unit dalam pengorganisasian kekuasaan negara sebagai subsistem ketatanegaraan telah mengalami perubahan. Dalam perspektif subjek hukum kenegaraan, perubahan sistem ketatanegaraan dengan membentuk, dan selain itu menegaskan pula kategori masing-masing lembaga yang terdapat di dalam kekuasaan kehakiman. Sebagaimana perbahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwasanya pelaku kekuasaan kehakiman ada tiga yaitu: Mahkamah Agung, Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian selain menegaskan pelaku Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan adanya badan-

⁶⁰ M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), h.31.

⁶¹ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: Penerbit STIH IBLAM, 2004), h.10.

badan lain yang berfungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman seperti; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Aparat eksekusi. Fungsi masing-masing lembaga negara tersebut berkaitan dengan fungsi Kekuasaan Kehakiman yakni fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan.⁶²

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak 29 Oktober 2009, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157). Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁶³

Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut konstitusi adalah mewujudkan cita-cita kemedekaan Republik Indonesia yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui jalur hukum. Dan menurut doktrin pemisahan kekuasaan, fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara guna

⁶² Ahmad Fadli Sumasi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, (Malang: Setara Press, 2013), h. 68.

⁶³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ke 11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 209

mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, guna mencegah terjadinya instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan. Maka kekuasaan kehakiman haruslah menjadi kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi *check and balances* bagi institusi kenegaraan lainnya, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling kongkrit.⁶⁴

Oleh karena itu, lembaga peradilan sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) hendaknya difungsikan sebagai:

1. Katup penekan (*pressure value*), yaitu kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan Undang-undang adalah untuk menekan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dengan cara menghukum setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan oleh pihak manapun. Setiap pelanggaran adalah yang bersifat inkonstitusional, bertentangan dengan ketertiban umum (*contrari to the public order*), dan yang melanggar kepatutan (*violation with the reasonable ness*).
2. Senjata pamungkas (*ultimum remidium*), yaitu konstitusi dan undang-undang menempatkan badan-badan peradilan sebagai senjata pamungkas, disamping sebagai tempat terakhir (*the last resort*), untuk mencari dan menegakkan

⁶⁴ Adnan Buyung Nasution, dkk., *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: ICEL, 1999), h.xii.

keadilan. Hal ini berarti menutup adanya lembaga di luar pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan.

3. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*the guardian of citizen's constitutional rights and human rights*), yaitu lembaga peradilan harus mampu dan mengedepankan hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (to respect, to protect and to fullfi of human rights).
4. Wali masyarakat (*judiciary are regarded as costudian of society*), yaitu badan-badan peradilan merupakan tempat peradilan (*protection*) dan pemulihan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) bagi anggota masyarakat yang merasa teaniaya atau dirugikan kepentingannya atau diperkosa haknya baik oleh perorangan, kelompok bahkan oleh penguasa. Hal ini berarti lembaga peradilan berwenang memutus dan menentukan tindakan itu boleh dilakukan atau tidak, tindakan/ perbuatan yang boleh dilakukan itu telah melampaui batas atau tidak, dan menentukan apakah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*the freedom of contract principle*) bertentangan dengan ketertiban umum atau kepatutan.⁶⁵
5. Prinsip hak imunitas (*immunity right*), yaitu dalam menjalankan fungsi peradilan maka lembaga peradilan oleh hukum diberikan hak imunitas.
6. Putusan pengadilan seperti putusan tuhan (*judicium die*), yaitu hal ini sebagai prinsip bebas dan mandiri yang diberikan konstitusi dan undang-undang kepada lembaga peradilan dan hakim.

⁶⁵ Zainal Arifin Housein, *Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, (Yogyakarta; jurnal media hukum, volume 20, nomor 1 juni 2013),h.31

Kebebasan hakim dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan.⁶⁶

Ada enam prinsip penting dalam kekuasaan kehakiman yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu prinsip-prinsip *independence*, *impartiality*, *integrity*, *equality*, dan *competence and diligence*. Ke-enam prinsip tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Independensi (*independence principle*)

Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan atas setiap perkara dan terkat erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat, dan percaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi dengan halus, dengan tekanan, paksaan, kekerasan atau balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan, dengan ancaman penderitaan

⁶⁶ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Suharto*, (Jakarta: Elsem, 2004), h.45.

atau kerugian tertentu, atau dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.

2. Ketidakberpihakan (*impartiality principle*)

Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, menjaga jarak yang sama dengan semua pihak yang terkait dengan perkara, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun, disertai penghayatan yang mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.⁶⁷

3. Integritas (*integrity principle*)

Integritas hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan kebutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat Negara dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya.

4. Kepantasan dan kesopanan (*propriety principle*)

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan.

⁶⁷ Putra Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Tafa Media, 2014), h.113.

5. Kesetaraan (*equality principle*)

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin pelakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain.

6. Kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence principle*)

Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Pengaturan kebebasan hakim dalam mengadili juga diatur dalam konvensi Internasional, menjamin kebebasan hakim dalam mengadili dan imunitas dari segala tuntutan hukum. Jaminan hukum terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang bersumber dari asas-asas peradilan, yaitu *Ius Curia Novit* (putusan hakim yang dianggap tahu hukum), *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan hakim dianggap benar). Sedangkan dalam mengadili, hakim dibebaskan dari segala tuntutan hukum, apabila hakim dianggap melakukan kesalahan teknis yuridis, bukan etik moral.

Jaminan terhadap kebebasan hakim dalam mengadili yang sangat memadai dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan,⁶⁸ sudah seharusnya dipergunakan secara proporsional, jangan menonjolkan sikap *arrogance of power*, memperlakukan kebebasan untuk menghalalkan cara, maka di gunakan dengan acuan:

⁶⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Sinar Grafika, 1996), h.23.

1. Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang sedang di periksanya, sesuai dengan asas dan status *law must prevail* (ketentuan undang-undang harus di unggulkan)
2. Menafsirkan hukum yang tepat dengan cara-cara pendekatan yang dibenarkan (penafsiran sistematic, sosiologis, bahasan analogis dan *a contrario*) atau mengutamakan keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus di unggulkan)
3. Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum (rect vinding), dasar-dasar dan asas hukum melalui doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudence maupun melalui pendekatan “realisme” yakni mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, moral, agama kepatuhan dan kelaziman.

B. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DI PA LUBUK PAKAM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN NO. 0017/PDT.P/2020/PA.LPK

Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.⁶⁹

⁶⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.211

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.

Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Kepala putusan;
2. Identitas para pihak;
3. Pertimbangan;
4. Amar.

Kepala putusan setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut (Pasal 224 HIR, 258 RBg).⁷⁰

Identitas para pihak setiap putusan harus memuat identitas dari para pihak yang meliputi nama, umur, alamat, dan nama kuasanya kalau ada.

Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumannya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada

⁷⁰ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Igitasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.85

masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Alasan sebagai putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 RBg). Di samping itu, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg, mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus di batalkan (Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970).

Amar atau dictum merupakan jawaban terhadap petitum (tuntutan) daripada gugatan. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum. Hal tersebut terkait dengan adanya suatu asas, bahwa: “hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.” (Pasal 178 ayat (2) dan (3), Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.)

Amar (dictum) dibagi menjadi apa yang disebut deklaratif dan apa yang disebut dictum atau dispositif. Bagian yang disebut deklaratif merupakan penetapan daripada hubungan hukum yang menjadi sengketa. Adapun bagian yang disebut dispositif ialah yang memberi hukuman atau hukumannya; yang menolak atau mengabulkan gugatannya.⁷¹

⁷¹ Ibid, h.56

Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua, hakim anggota, dan panitera (Pasal 184 ayat (3) HIR, Pasal 195 ayat (3) RBg).

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁷²

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hokum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hokum biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang..... Dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Di sinilah argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.

Setelah hal-hal tersebut di atas dipertimbangkan satu per satu secara kronologis, kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara’ yang menjadi sandaran

⁷² Sarwono, *Hukum Acara*, h.211.

pertimbangannya. Sebaiknya diutamakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al'Hadis, baru pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan.

Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan itu. Dalam praktik, uraian tentang pertimbangan hukum dimuat dalam bentuk “mengingat”. Contohnya mengingat pasal ayat... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (LN. 1975-12) dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁷³

Menurut keterangan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selain daripada keterangan yang telah penulis jelaskan di atas, juga tidak ada paksaan maupun intimidasi dalam perkara, hakim juga menetapkan demi menimbang kemaslahatan bagi pihak yang berperkara. Dimana sebagian besar pihak yang mengajukan dispensasi nikah disebabkan sudah hamil diluar nikah, termasuk perkara No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk yang menjadi bahan untuk di teliti oleh penulis.⁷⁴

Mashlahah (مصلحة) dalam bahasa Arab berbentuk *masdar* dari lafadz صلح- يصلح yang bermakna baik atau positif.⁷⁵ Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁷⁶ Sedangkan secara terminology, mashlahah dapat

⁷³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lindungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Group,2008),h.295

⁷⁴ Muslim, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Wawancara Penelitian, Lubuk Pakam, 3 Agustus 2020.

⁷⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997),h.788.

⁷⁶ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Nadhah al 'Arabiyah,1971),h.3-4.

diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).⁷⁷

Di sebabkan 99% permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim PA Lubuk Pakam karena sudah hamil sebelum menikah, karena jika tidak di nikahkan akan di khawatirkan terjadi percekcoan antara keluarga, dimana pihak keluarga perempuan memaksa pertanggungjawaban atas pihak laki-laki untuk segera menikahi perempuan yang dalam perkara tersebut.

Yang dimaksud dengan kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.⁷⁸

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang

⁷⁷ Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Mashlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam* Istilah: *Jurnal Digital Ishraqi* 5,1 (Januari-Juni 2009):24

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2008), h.124.

perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinahan.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.

Adalah kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk mennghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.⁷⁹

Menurut ulama Syafi'iah hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahnya itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukann itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁸⁰

Serta dalam KHI pada Bab VIII “Kawin Hamil” pasal 53 di jelaskan bahwa:

⁷⁹ M. Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al Mawardi prima, 2003), h. 184.

⁸⁰ Ghazali, *Fikih Munakahat*, h. 124.

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ada beberapa pendapat Ulama yang mengatakan tidak sahnya pernikahan dengan wanita yang sedang hamil, penulis mengutip beberapa pendapat yang mengatakan hal demikian yakni:⁸¹

1. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil bagi wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.
2. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang

⁸¹ Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.37.

menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.⁸²

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan”.

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemashlahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.

Demi mengedepankan *al-Maslahah al-Mursalah* dalam kaidah ushul fiqh yakni lebih mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan mencegah agar tidak terjadinya kemudharatan yang dikhawatirkan, maka ini menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam menetapkan putusan dispensasi nikah.

C. Apakah Putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk Tersebut Sudah Sesuai Dengan Perma No.5 Tahun 2019?

Setelah melakukan reset tertanggal pada 3 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B dengan Nomor: B.726/FSH.I/PP.00.9/7/2020, penulis telah

⁸² Ibid,h.37

mengumpulkan data dan mewancarai salah satu pegawai Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Muslim,SH.,MA sebagai ketua dari pengadilan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B bahwa hakim tidak konsisten menerapkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 pada permohonan Dispensasi Kawin secara penuh, namun tetap mempertimbangkan beberapa hal yang tercantum dalam Perma No. 5 Tahun 2019, yaitu:

1. Pertimbangan ekonomi

Apakah sudah memiliki pekerjaan atau belum. Kelayakan bagi laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga untuk menafkahi keluarga.

2. Tidak ada paksaan terhadap pihak yang berperkara, sekalipun tidak masuk dalam putusan, tetap dalam persidangan menjadi bahan pertimbangan hakim.

Berikut beberapa point yang terdapat dalam Perma No. 5 Tahun 2019 yang belum di terapkan dalam permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B, yaitu:

1. Pada Pasal 1 ayat (11) bahwa “Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah”. Dalam penerapannya belum di terapkan dengan keberadaan hakim tunggal pada persidangan.
2. Pada Pasal 11 ayat (2) bahwa “Hakim dan Penitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan”. Pada penerapannya dalam persidangan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Lubuk Pakam belum menerapkan isi Perma No. 5 Tahun 2019 pada Pasal tersebut.

3. Pada Pasal 16h bahwa “Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)”. Bahwa hakim sekalipun belum menerapkan Pasal 16h tersebut dalam Putusan No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk, namun hakim tetap menanyakan tentang psikologi anak dalam bentuk nasehat.

Seharusnya hakim dalam menetapkan permohonan Dispensasi Kawin sudah sepenuhnya menerapkan Perma No.5 Tahun 2019 sebagai bentuk hakim taat azas, sepanjang tidak dijalankan maka putusan tidak bernilai, namun seorang hakim memiliki hak imunitas, dimana hak imunitas di pandang lebih tinggi dari apapun. Bahwa putusan hakim di anggap benar sepanjang tidak ada putusan yang lebih tinggi yang dapat membatalkannya. Dan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tersebut tidak terdapat aturan peralihan, artinya tidak terdapat keharusan bagi hakim, hakim wajib memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Dispensasi Hukum mengikuti Perma No.05 Tahun 2019, sekiranya tidak mengikuti Perma tersebut maka putusan batal demi hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kontruksi hokum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode maslahah mursalah yaitu maslahah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah.

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi nikah adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undang tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

Dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Roihan A.Rasyid mengatakan makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun,

dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada pengadilan agama dalam bentuk permohonan. Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (5) menyatakan Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

2. Pertimbangan atau sering disebut juga *considerans* merupakan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumannya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Alasan sebagai putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (Pasal 184 HIR, 195 RBg). Di samping itu, Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg, mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Lebih lanjut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus di batalkan (Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970). Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hokum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hokum biasanya dimulai dengan kata-kata “Menimbang..... Dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan

alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Di sinilah argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung. Setelah hal-hal tersebut di atas dipertimbangkan satu per satu secara kronologis, kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara' yang menjadi sandaran pertimbangannya. Sebaiknya diutamakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al'Hadis, baru pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan itu. Dalam praktik, uraian tentang pertimbangan hukum dimuat dalam bentuk "mengingat". Contohnya mengingat pasal ayat... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (LN. 1975-12) dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menurut keterangan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selain daripada keterangan yang telah penulis jelaskan di atas, juga tidak ada paksaan maupun intimidasi dalam perkara, hakim juga menetapkan demi menimbang kemaslahatan bagi pihak yang berperkara. Dimana sebagian besar pihak yang mengajukan dispensasi nikah disebabkan sudah hamil diluar nikah, termasuk perkara No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk yang menjadi bahan untuk di teliti oleh penulis.

3. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1 B bahwa hakim tidak konsisten menerapkan

Perma Nomor 5 Tahun 2019 pada permohonan Dispensasi Kawin secara penuh, namun tetap mempertimbangkan beberapa hal yang tercantum dalam Perma No. 5 Tahun 2019.

B. SARAN

1. Penulis memahami bahwa dalam menetapkan putusan hakim memiliki hak imunitas, dimana putusan dianggap benar sampai ada putusan yang lebih tinggi yang dapat membatalkannya, namun harapannya penetapan putusan dalam permohonan Dispensasi Kawin harus sesuai dengan tatacara yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yakni Perma Nomor 5 Tahun 2019.
2. Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang menjadi wewenang dari Mahkamah Agung hendaknya lebih ditegaskan agar pihak yang terkait di dalamnya mengikuti sepenuhnya peraturan yang telah ditetapkan, didimana dalam Perma tersebut tidak terdapat Pasal yang menyatakan batal demi hukum sekiranya hakim tidak mengikuti peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Marwazi, Imam Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Nashr, *Ikhtilaf al-Ulama*, Beirut: ‘Alim al-Kutub, 1985.
- Ali, Muhammad Daud dan Daud, Halibah. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarat: Raja Grafindo, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pedata Islam di Indonesia cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- An-Nazair, *Al-Asybah Wa An-Nazair* As-Suyuti. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983
- As’ad, Aliy. *Fathul Mu’in Jilid III*. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.
- A.S Bambang Sugeng dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen litigasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2009.
- Asrun, A.Muhammad. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Suharto*. Jakarta: Elsem, 2004.
- Astomo, Putra. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Tafa Media, 2014.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islami*, juz 1. Kairo: Dar al-Urubah, 1964.
- Bakti, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syari’ah al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bajury, Ibrahim al. *Hasyiyatu al Bajury ‘ala ibni Qasim al Ghazy*. Beirut: Daru Ihya’i Turats al ‘Araby: 1996.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah*, cet 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

- Dkk, Adnan Buyung Nasution. *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: ICEL,1999.
- Dkk, Asep Saepudin Jahar. *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Dkk, Chaerul Umam. *Ushul al-Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia,2000.
- Fadhilah, Nur dan Rahmah Khairiyati. *Rekonstruksi Batas Usia Pekawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia,” Istilah: Jurnal Syari’ah dan Hukum* 4. (Juli 2012).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Perdana Media Group,2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum perkawinan Indonesia Menurut Peundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar maju,2007.
- Hamaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press,2002.
- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Kalola Printing,2017.
- _____ *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bhakti,1997.
- _____ *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Bandung: Sinar Grafika,1996.
- Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Mashlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam* Istilah: *Jurnal Digital Ishraqi* 5,1. (Januari-Juni 2009).
- Hasan, Husein Hamid. *Nazariyyah al-Maslahah Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nadhah al ‘Arabiyah,1971.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ke 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Housein, Zainal Arifin. *Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*. Yogyakarta; jurnal media hukum, volume 20, nomor (1 juni 2013).
- Indah, Elly Surya. *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No.1 Tahun 1974*,:Skripsi. (November 2008).
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kunardi, Muhammad dan Muzamil, HM Mawardi. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang" *Istilah: Jurnal Pembaharuan Hukum* (1,2 Mei-Agustus 2014).
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet.1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lindungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- M.Gultom, Binsar. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: Penerbit STIH IBLAM, 2004.

- Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. alih bahasa Masykur AB Cet IV. Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad, Husain. *Fiqih Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Jogjakarta: LKSI, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Wawancara Penelitian, Lubuk Pakam, 3 Agustus 2020.
- Najib, Agus Moh. *Maqasid Al-Syari'ah*. IAIN Sunan Kalijaga: BEMJ PHM, 2003.
- Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 6401 (2019).
- Pasal 7, Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah, 1955.
- Rasyid, M. Hamdan. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: PT. Al Mawardi prima, 2003.
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo, 1999.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Juz 1. Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo: Dar Al-Fat, 1990.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Shalihah, Septiana Anipatus. “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik),” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia,2018).
- S.Lumbun, Ronald. *Perma RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015.
- Sholikin, Nur. “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma)” Istilah: Jurnal Rechts Vinding. (Februari 2017).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta,1992.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Bina Cipta,1997.
- _____. *Pokok-pokok Hukum perdata-cet 31*. Jakarta: Intermasa,2003.
- Sumasi, Ahmad Fadli. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*. Malang: Setara Press,2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,Cet. 2. Jakarta: Kencana,2007.
- Syathibi, Imam. *Al-Muwafaqat*. Beirut,Libanon: Darul Kutub Ilmiah.1962
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,2016.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Parnadamedia Group,2015.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet 1. Yogyakarta: Penerbit

Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984.

Winardi dan Sirajuddin. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara

Press, 2015.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Mu'asasah Al-Risalah, 1998.

Zuhailiy, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islamiy*. Dimsyag: Dar Al-Fikr, 1998.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sarang Helang Kec. Sei Kepayang Timur Kab. Asahan pada tanggal 03 Maret 1998, anak ke-5 dari 6 bersaudara. dilahirkan dari pasangan Bapak Usman Siagian dan Ibu Zainab Manurung.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 010018 Sarang Helang pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis juga menyelesaikan sekolah agama di Madrasah Ibtidaiyah Al-wasliyah Sarang Helang, tingkat SLTP di MTs Sei Pasir pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di MAS PMDU Kisaran Pada tahun 2016 Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Ad dakwah Sumut, juga menjadi anggota aktif Komunitas Mujahidah mulai tahun 2019.